

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Penelitian Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang telah peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan menganalisisnya sehingga dapat diketahui apakah proses implementasi program berhasil atau tidak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan serta dokumentasi peneliti terkait dengan bagaimana proses Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang, serta observasi yang peneliti lakukan dianalisis dengan model implementasi Ripley dan Franklin, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang berjalan baik dan memberikan hasil yang baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, berjalan baiknya program dibuktikan dengan tercapainya tujuan program serta dibuktikan dengan kembali diarahnya Piagam Adipura Kota Padang pada Tahun 2016, 2017 dimana Kota Padang tidak pernah menerima penghargaan Adipura dari tahun 2009, dimana Piagam Adipura merupakan penghargaan yang didapatkan untuk penghargaan Kota Bersih yang merupakan nilai utamanya melihat kebersihan pariwisata, pasar, sekolah, lingkungan tempat tinggal dan berbagai sektor lainnya. Meskipun dengan dilihat berhasil dalam pelaksanaan GPBPS ini bukan berarti tidak memiliki masalah dan hambatan dalam

pelaksanaannya tetapi masalah dan hambatan tersebut dapat diantisipasi dan tidak memberikan dampak yang membuat pelaksanaan program menjadi tidak berhasil.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang adalah perilaku implementor yang tidak paham terhadap kebijakan. Dilihat dari sisi *compliance* atau kepatuhan terhadap implementor yang tidak paham dan tidak patuh terhadap pelaksanaan GPBPS, dibuktikan dengan bertanya informan kepada peneliti terhadap program GPBPS bahkan ada OPD yang baru mendengar dan mengetahui program GPBPS, sehingga peneliti melakukan sosialisasi atau pengenalan program kembali ke OPD yang tidak mengetahui program dan tupoksi mereka di program GPBPS. Ketidapatuhan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman implementor tersebut mengenai program dikarenakan tidak menyeluruhnya sosialisasi program oleh pihak terkait agar implementor mengetahui program.

Dilihat dari variabel *what's happening* yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan program atau permasalahan-permasalahan yang terjadi selama Implementasi Program Gerakan Padang Bersih Padang Sehat di Kecamatan Padang Barat Kota Padang ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu dilihat dari indikator *number and identity* adalah jumlah implementor program yang banyak membuat pelaksanaan dari program GPBPS menjadi sangat kompleks, semakin banyak implementor akan semakin kompleks pelaksanaan program, sehingga akan semakin sulit dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena rantai komunikasi yang panjang.

Pada indikator *Lock of Hierarchy* (Ketiadaan Hirarki), garis hirarki baik implementor dengan implementor maupun implementor dengan target group sudah jelas namun dalam proses pelaksanaan program GPBPS cenderung terjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah komunikasi antara lurah dengan masyarakat, dimana sering diabaikannya himbauan untuk melakukan kegiatan gotong royong oleh masyarakat yang dapat menghambat terwujudnya kebersihan di lingkungan Kecamatan Padang Barat.

Dilihat dari sisi indikator *The Proliferation and Complexity of Government Programs* (Perkembangan dan Kerumitan Program Pemerintah) dalam pelaksanaan program GPBPS ada beberapa program lain yang dilaksanakan implementor yang dapat mempengaruhi efektifitas dari hasil kinerja implementor itu sendiri dan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung berhasilnya program GPBPS di Kecamatan Padang Barat khususnya dan Kota Padang umumnya, seperti program Gerkasih (Gerakan Kecamatan Bersih) Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), serta Program Kota Sehat.

Kemudian untuk indikator *The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels* (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintah), dalam pelaksanaan program GPBPS, Pemerintah Kota Padang belum ikut aktif berpartisipasi untuk membantu mensukseskan jalannya Program GPBPS disebabkan masih banyaknya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program yang kurang serta belum maksimalnya anggaran pelaksanaan program di setiap OPD terlibat.

Indikator terakhir dari variabel *Whats Happening* ini adalah *The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation* (Faktor-Faktor yang tidak terkendali diluar pelaksanaan program), faktor yang tidak terkendali ini menjadi

masalah tersendiri dalam pelaksanaan program GPBPS yang dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya atau suksesnya suatu program. Di Kecamatan Padang Barat sendiri faktor-faktor yang tidak terkendali oleh implementor yaitu adanya musibah bencana alam seperti banjir yang dapat menghanyutkan seluruh sampah yang akan bermuara di muara Pantai Padang yang dapat mengakibatkan kewalahannya DLH, Dinas Pariwisata, Kecamatan dan pihak Kelurahan untuk menanggulangi hal demikian. Serta perilaku sebagian masyarakat yang masih tidak peduli dengan kebersihan seperti menumpuk sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah dibawah pohon, membuang sampah di sungai, membuang sampah dari kendaraan.

Semua faktor-faktor tersebut yang peneliti kemukakan menjadi penghambat jalannya program GPBPS tetapi tidak memberikan dampak yang terlalu buruk dikarenakan dari hasil penelitian, wawancara, dokumentasi serta observasi peneliti serta dokumen-dokumen terkait peneliti dapat menyimpulkan Program GPBPS di Kecamatan Padang Barat khususnya, dan Kota Padang umumnya telah dapat dikatakan berhasil untuk mewujudkan Padang menjadi Kota bersih, asri, nyaman dan sehat. Dibuktikan dengan komitmen Pemerintah Kota Padang beserta LSM terkait dibantu masyarakat Kota Padang untuk meminimalisir semua dampak buruk yang akan terjadi dan meminimalisir semua permasalahan yang terjadi dengan berbagai metode penyelesaian masalah kebersihan perkotaan sehingga membawa Kota Padang kembali meraih penghargaan Adipura dan juga dapat kita lihat bahwa sudah mulai tertata dan bersihnya berbagai sektor di Kota Padang, dan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi kedepannya diharapkan dapat di atasi dengan baik.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Padang bersama masyarakat Kota Padang untuk dapat menyempurnakan pelaksanaan program GPBPS kedepannya sehingga bisa diperoleh hasil yang maksimal. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengaktifkan kembali dan lebih gencar lagi pelaksanaan sosialisasi program GPBPS keseluruhan implementor terlibat dan menjelaskan dengan baik tupoksi mereka terkait pelaksanaan program, serta memberikan informasi menyeluruh kepada masyarakat Kota Padang bahwa ada sebuah program GPBPS yang melibatkan masyarakat agar pelaksanaan program lebih maksimal lagi. Untuk kegiatan sosialisasi ini bisa dilakukan dengan lebih gencarnya memasang baliho, spanduk untuk media agar masyarakat lebih tau, dan untuk lebih dekatnya lagi dengan masyarakat bisa menggunakan pamflet yang di bagi-bagikan.
2. Perlunya peningkatan pengawasan dan peningkatan kinerja dari seluruh implementor termasuk Anggota PK3 dan masyarakat agar dapat menjalankan program dengan baik. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara Inspeksi Mendadak atau sidak, razia pelanggaran kebersihan secara periodik dan dilaksanakan dengan berkelanjutan.
3. Perlu adanya kejelasan sanksi yang tegas dan mengikat untuk semua pelanggaran terkait program GPBPS baik oleh dinas, Kecamatan, Kelurahan beserta masyarakat, sanksi yang aplikatif dan menjerakan. Bagi OPD dapat diberikan teguran secara tertulis oleh Walikota

Padang. Serta untuk masyarakat yang melanggar bisa dilakukan sistem denda. Selain dari kejelasan sanksi yang tegas dan mengikat, bisa diberikan *reward* agar OPD terlibat dan masyarakat lebih antusias dalam pelaksanaan program, bisa dilihat dari masyarakat yang pemukiman tempat tinggal paling bersih akan diberikan *reward*, bisa berupa piala dan uang tunai.

4. Perlunya kesesuaian kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dengan yang tersedia di setiap OPD agar pelaksanaan GPBPS agar lebih maksimal, dengan cara menambah pegawai honor untuk diberdayakan dalam kegiatan kebersihan dan kesehatan lingkungan.
5. Perlu adanya peningkatan jumlah serta kelengkapan sarana dan prasarana dibarengi dengan tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi layak pakai dan terawat.
6. Memaksimalkan anggaran atau Sumber Daya Finansial sehingga lebih produktif dalam pelaksanaan program.
7. Perlu adanya SOP untuk pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antar OPD terkait program GPBPS, dengan melibatkan lebih aktifnya Walikota agar pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lebih baik, terarah, dan bisa mengikat setiap implementor Program GPBPS.